



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980426
Fax (0295) 6980425 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
REMBANG – KODE POS 59211

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Rembang, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	7
1.4 Landasan Hukum Penyusunan LKJiP	8
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan LKJiP	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kinerja	12
2.3 Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Analisis Capaian Kinerja	21
3.3 Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Rekomendasi	34

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 11
Tabel 2	Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang 12
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022 13
Tabel 4	Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 14
Tabel 5	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022 21
Tabel 6	Perbandingan Antara Realisasi Dengan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2020 -2022 23
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang 24
Tabel 8	Analisis Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022 26
Tabel 9	Tingkat Efisiensi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022 28
Tabel 10	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022 29
Tabel 11	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 30

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKjIP wajib disusun oleh instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi, sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 18, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja SKPD, wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2022 berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, Rencana Kerja tahun 2022 dan Penetapan kinerja tahun 2022.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, sekaligus menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a. TUGAS POKOK

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. FUNGSI :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIS

a. TUGAS POKOK :

melaksanakan perumusan konsep dan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

b. FUNGSI :

- 1) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 2) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;

- 3) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 4) pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. TUGAS POKOK

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terdiri dari pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

b. FUNGSI ;

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Pengelolaan Informasi Publik; dan
- b. Kelompok Fungsi Pengelolaan Komunikasi Publik.

4. KEPALA BIDANG TATA KELOLA DAN LAYANAN INFORMATIKA

a. TUGAS POKOK

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang tata kelola dan layanan informatika yang terdiri dari tata kelola informatika dan layanan informatika.

b. FUNGSI

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika, dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Tata Kelola Informatika; dan
- b. Kelompok Fungsi Layanan Informatika.

5. KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

a. TUGAS POKOK

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang statistik dan persandian yang terdiri dari statistik dan persandian.

b. FUNGSI

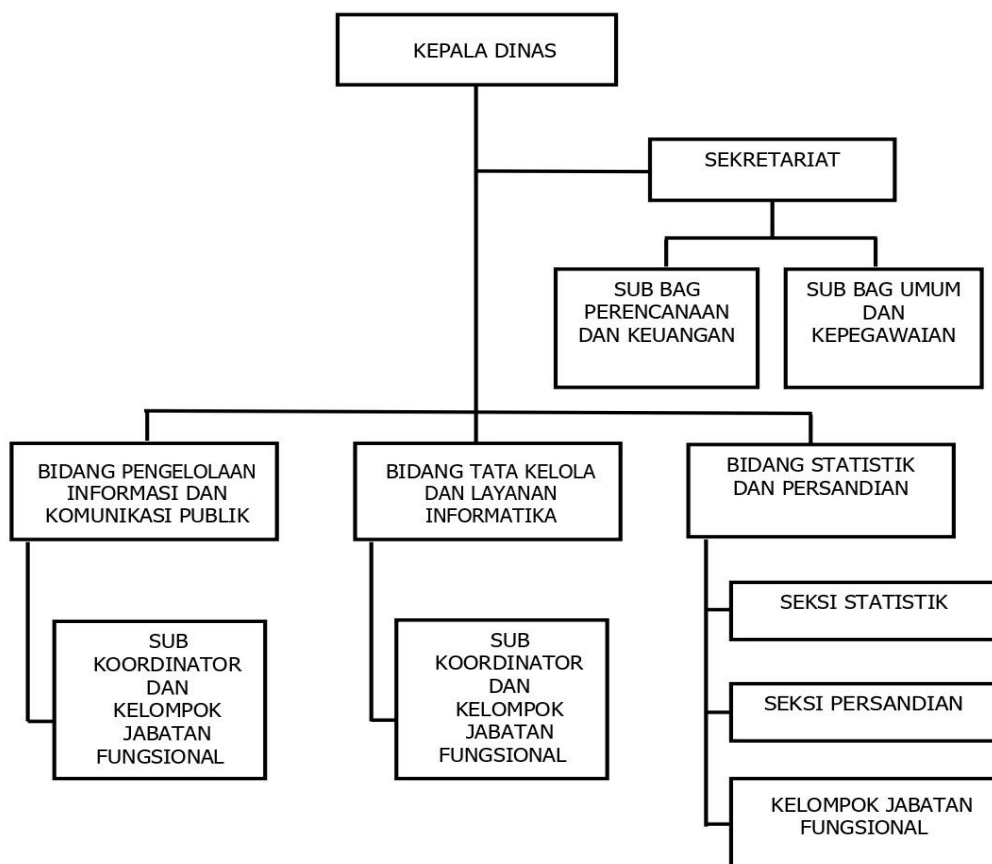
- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang statistik dan persandian;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang statistik dan persandian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang statistik dan persandian; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 4) Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika;
- 5) Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - a. Seksi Statistik, dan
 - b. Seksi Persandian
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang



1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama

Aspek strategis organisasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Belum Optimal. Oleh karena itu diperlukan adanya akselerasi pemenuhan persyaratan dalam Penilaian SPBE, terutama dokumen dan operasional pada domain manajemen SPBE;
2. Optimalisasi Penggunaan IT Masih Rendah
Diperlukan kolaborasi antar aplikasi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka perwujudan Rembang Satu Data dan Rembang *Smart City* ;
3. Pengelolaan Komunikasi Publik Belum Optimal
 - a. Diperlukan peningkatan analisis isu publik sehingga informasi dan respon Pemerintah Kabupaten Rembang lebih tepat sasaran.
 - b. Diperlukan peningkatan jumlah dan jenis konten media publik serta optimalisasi CB FM;
4. Ketersediaan data statistik sektoral masih kurang
Diperlukan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka mewujudkan Satu Data Rembang;
5. Belum Optimalnya Keamanan Informasi
 - a. Diperlukan operasionalisasi Tim CISRT (*Computer Security Incident Response Team*) Kabupaten Rembang.
 - b. Diperlukan Peningkatan Kualitas SDM pengelola *cyber security*.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan LKJiP

LKJiP Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- g. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- h. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

1.5 Sistematika Penyusunan Laporan LKJiP

LKJiP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama, Landasan Hukum penyusunan dan Sistematika Penyusunan Laporan LKJiP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memuat Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup

Memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Tujuan strategis urusan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang termaktub dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 adalah **"Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah"**. Hal ini sejalan dengan visi Bupati Rembang sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu **"Mewujudkan Rembang Gemilang 2026"**. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) misi, dimana tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menunjang misi ke-1(satu) yaitu **"Mengembangkan profesionalitas, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi"**. Salah satu tujuan dari misi ke 1(satu) adalah **"Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih"** dengan sasaran **"Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan"**. Sasaran daerah ini memiliki 4 (empat) indikator yaitu : Nilai SAKIP, Opini BPK atas LKPD, Indeks Merit Sistem dan Indek SPBE. Selanjutnya Indeks SPBE yang merupakan indikator sasaran daerah ditarik menjadi indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien;
- 2) Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah;
- 3) Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik;
- 4) Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral.

Penjabaran tujuan dan sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026, secara lebih detail tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel I
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Indikator Tujuan :	3,20	3,23	3,3	3,35	3,40
2			Indeks SPBE					
			Indikator Sasaran					
a.		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	3,00	3,03	3,06	3,09	3,12
b.		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks tatakelola	2,60	2,63	2,66	2,69	2,72
c.		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks penerapan manajemen	2,18	2,21	2,24	2,27	2,30
d.		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks layanan	3,63	3,66	3,69	3,72	3,75
e.		Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	290	300	310	320	330
f.		Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	90	90	90	90
g.		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	55	60	65	70	75

2.2 Rencana Kinerja

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan menjabarkan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Perencanaan Kinerja Tahun 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Indikator Tujuan : Indeks SPBE	angka	3.20
			Indikator Sasaran		
1.1		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan Indeks tatakelola Indeks penerapan manajemen Indeks layanan	angka angka angka angka	3.00 2.60 2.18 3.63
1.2		Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	angka	290
1.3		Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	angka	90
1.4		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	55

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada keluaran (*output*) tetapi hasil(*outcome*) yang seharusnya dicapai.

Target kinerja yang diperjanjikan secara berkesinambungan, merupakan wujud pembangunan berkelanjutan. Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang Tahun 2022

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	angka	3.20
	Sasaran :	Indikator Sasaran		
1.1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan Indeks tatakelola Indeks penerapan manajemen Indeks layanan	angka angka angka angka	3.00 2.60 2.18 3.63
1.2	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	angka	290
1.3	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	angka	90
1.4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	55

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut, berkontribusi pada pencapaian misi daerah yang ke 1(satu) yaitu **“Mengembangkan profesionalitas, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi”** dengan sasaran daerah **“Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan”** dimana salah satu indikator sasaran daerah tersebut adalah Indeks SPBE.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada tahun 2022 melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 37 (Tiga puluh tujuh) yang secara lebih detail tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang Tahun 2022

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.104.763.000
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7.998.003.000
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	80	5.138.003.000
		IKM	82	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100	27.000.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	15.000.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	7.000.000
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4	5.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan keuangan	95	3.312.543.000
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	3.101.423.000
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	206.120.000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.000.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1	200.000.000
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase jumlah informasi tentang regulasi atau kebijakan cukai yang disosialisasikan	100	200.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	128.000.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8.000.000
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	7.000.000
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	10.000.000
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	29.000.000
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	8.000.000
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	6.000.000
g	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	15.000.000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	45.000.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100	38.750.000
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	28.750.000
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	10.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian	100	1.349.210.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.170.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	739.840.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	607.200.000
		Jumlah pembayaran upah administrasi kantor	26	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah	100	82.500.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	39.000.000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	15.000.000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	15.000.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	13.500.000
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	% cakupan pelayanan informasi publik	100	1.105.000.000
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyajikan data yang lengkap	100	1.105.000.000
a	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	20.000.000
b	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2	290.000.000
		Jumlah Konten Publikasi	790	-
		Jumlah website yang aktif	41	-
c	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	196.500.000
		Jumlah Siaran Radio	9855	-
d	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	20.000.000
e	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1	528.500.000
		Jumlah pemberitaan di media massa	1400	-

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
f	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	50.000.000
		Jumlah partisipasi festival yang diikuti	1	-
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100%	1.755.000.000
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id	100	150.000.000
a	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	150.000.000
		Jumlah domain Pemkab dan desa yang dikelola	335	-
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.83	.605.000.000
		Tersedianya dokumen penilaian mandiri SPBE kab Rembang	1	
a	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	101.450.000
		Tingkat pematangan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE	4	-

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
b	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	998.550.000
		Jumlah pemanfaatan layanan jaringan intra pemerintah daerah	100	-
c	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah layanan yang terintegrasi	5	-
d	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	410.000.000
		Jumlah layanan yang memanfaatkan sistem penghubung pemerintah daerah	3	-
e	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	95.000.000
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			56.760.000
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase publikasi data statistik sektoral	100	56.760.000
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase publikasi data statistik yang tersusun	100	56.760.000
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	56.760.000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			50.000.000
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	% Cakupan pengamanan informasi	100	50.000.000
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100	50.000.000
a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	50.000.000
		Persentase gangguan keamanan yang ditangani	100	-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Adapun skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50,%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Di dalam Rencana Strategis (Renstra), disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang diuraikan kedalam 7 (tujuh) indikator kinerja dimana pencapaian kinerja untuk tahun 2022 dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2022

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	3.20	3.19	99.69%	Baik	Kemenpan RB
		Indikator Sasaran					
1.1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	3.00	3.40	113.33%	Sangat Baik	Kemenpan RB

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
		Indeks tatakelola	2.60	2.70	103.85%	Sangat Baik	Kemempaan RB
		Indeks penerapan manajemen	2.18	2.55	116.97%	Sangat Baik	Kemempaan RB
		Indeks layanan	3.63	3.63	100.00%	Baik	Kemempaan RB
1.2	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	290	294	101.38%	Sangat Baik	Penilaian Mandiri
1.3	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	85.98	95.53%	Baik	Komisi Informasi Jateng
1.4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	55	55	100.00%	Baik	Pengukuran Mandiri

Capaian kinerja Dinas Komunikas dan Informatika dengan 4 indikator sasaran sebagaimana disajikan dalam tabel 5, secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada indeks SPBE nilainya meningkat dibandingkan tahun 2021. Begitu juga pada nilai keterbukaan informasi publik juga mengalami kenaikan. Dengan melihat perkembangan dari tahun ke tahun, seperti variabel skoring kinerja masing-masing indikator mengalami penajaman dan perluasan cakupan, maka Dinas Komunikas dan Informatika perlu melakukan penyesuaian strategi kebijakan dan tidak boleh puas dengan hasil kinerja ini. Dinas Komunikas dan Informatika ke depan memiliki tantangan yang berat karena berhubungan dengan pengembangan teknologi informasi dimana dinamikanya sangat cepat.

Tahun anggaran 2022 merupakan tahun ke-1 (satu) dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dimana perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6
Perbandingan Antara Realisasi Dengan Capaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2020 -2022

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintah dan Kinerja	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	2.75	3.11	113.09%	2.85	2.76	96.84%	3.20	3.19	99.69%
	Sasaran :	Indikator Sasaran :									
1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	NA	2.53		NA	2,80		3.00	3.40	113.33%
		Indeks tatakelola	NA	2.43		NA	2.20		2.60	2.70	103.85%
		Indeks penerapan manajemen	NA	0		NA	1.00		2.18	2.55	116.97%
		Indeks layanan	NA	3.64		NA	3.69		3.63	3.63	100.00%
2	Terwujudnya perlindungan informasi terhadap pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	275	280	101.82%	285	289	101.40%	290	294	101.38%
3	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	70	93.4	133.43%	75	59.85	79.80%	90	85.98	95.53%
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	50	50	100.00%	50	50	100.00%	55	55	100.00%

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Akhir Rencana Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kerja	Capaian 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	3.19	3.40	93.82%
	Sasaran :	Indikator Sasaran :			
1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	3.40	3.12	108.97%
		Indeks tatakelola	2.70	2.72	99.26%
		Indeks penerapan manajemen	2.55	2.30	110.87%
		Indeks layanan	3.63	3.75	96.80%
2	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	294	330	89.09%
3	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	85.98	90	95.53%
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	55	75	73.33%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 7 (tujuh) indicator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang sudah ditetapkan, secara umum hampir memenuhi target akhir rencana strategis jangka menengah tahun 2026.

Sedangkan capaian rata-rata dari 7 (tujuh) indikator sasaran tersebut mencapai 96,2%. Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan atau kendala. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain :

1. Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, dan data yang belum akurat;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang belum memadai;
4. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi;
5. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kurang optimal.

Sedangkan strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut antara lain :

1. Pembaharuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
2. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui diklat, seminar, studi banding, tugas belajar;
3. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Adapun analisis yang penunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 digambarkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Analisis Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	3.20	3.19	99.69%	Hasil evaluasi SPBE untuk domain manajemen belum optimal	Peningkatan kualitas SPBE untuk domain, dengan penyusunan dokumen atau Perbub Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
2	Sasaran :	Indikator Sasaran					
a.	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	3.00	3.40	113.33%		
		Indeks tatakelola	2.60	2.70	103.85%		
		Indeks penerapan manajemen	2.18	2.55	116.97%		
		Indeks layanan	3.63	3.63	100.00%		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
b.	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	290	294	101.38%	Adanya penambahan aspek penilaian indikator pada salah satu area khususnya pada area Tata Kelola sehingga berpengaruh dengan adanya peningkatan skor penilaian indikator yang secara otomatis akan meningkat.	
c.	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	85.98	95.53%	Kinerja PPID pelaksana dalam penyediaan dokumen dan pembentukan ppid desa belum maksimal	Perlunya monev PPID pelaksana melalui website dan medsos opd
d.	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	55	55	100.00%	Adanya kerjasama antara BPS dan Dinkominfo dalam tahapan pengumpulan data kegiatan Rembang Dalam Angka. Namun demikian kesadaran OPD dalam mengumpulkan data masih tergolong rendah	Menyelenggarakan forum satu data 2 kali dalam satu tahun

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan setiap indikator sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Tingkat Efisiensi Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah							
1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	3.20	3.19	99.69%	1.755.000.000	1.704.118.315	97,10%	50.881.685
2	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	290	294	101.38%	50.000.000	49.915.011	99,83%	84.989
3	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	90	85.98	95.53%	1.105.000.000	1.090.109.828	98,65%	14.890.172
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	55	55	100.00%	56.760.000	55.457.145	97,70%	1.302.855

Adapun program/kegiatan yang menunjang tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 10
Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian	Program/ kegiatan	Indikator Kerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	99.69%				
	Sasaran :	Indikator Sasaran :					
1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	113.33%	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100%	Menunjang
		Indeks tatakelola	103.85%				
		Indeks penerapan manajemen	116.97%				
		Indeks layanan	100.00%				
2	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (keamanan informasi)	101.38%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	% Cakupan pengamanan informasi	100%	Menunjang
3	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	95.53%	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	% cakupan pelayanan informasi publik	98%	Menunjang
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral	100%	Menunjang

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, pada tahun 2022 memiliki total anggaran sebesar Rp. 8,104,763,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.683.814.944,- dan sisa sebesar Rp. 419.560.212,. Sedangkan persentase serapan anggaran sebesar 94,81% dengan tingkat efisiensi 5,19%. Adapun rincian anggaran dan realisasi secara lebih detail tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.998.003.000	7.578.442.788	94,75%	419.560.212
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.138.003.000	4.784.214.645	93,11%	353.788.355
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.000.000	26.794.900	99,24%	205.100
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.910.800	99,41%	89.200
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	6.934.600	99,07%	65.400
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.949.500	98,99%	50.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.312.543.000	3.184.477.916	96,13%	128.065.084
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.101.423.000	2.984.783.916	96,24%	116.639.084
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	206.120.000	194.724.500	94,47%	11.395.500
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.969.500	99,39%	30.500
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	190.216.000	95,11%	9.784.000
a	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	200.000.000	190.216.000	95,11%	9.784.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.000.000	119.462.735	93,33%	8.537.265
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.652.200	95,65%	347.800
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	6.085.500	86,94%	914.500
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.905.050	99,05%	94.950

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000	27.496.346	94,81%	1.503.654
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	7.867.100	98,34%	132.900
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.000.000	5.760.000	96,00%	240.000
g	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	14.923.100	99,49%	76.900
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	39.773.439	88,39%	5.226.561
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.750.000	37.910.600	97,83%	839.400
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.750.000	28.305.000	98,45%	445.000
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.605.600	96,06%	394.400
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.349.210.000	1.145.776.794	84,92%	203.433.206
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.170.000	1.518.000	69,95%	652.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	739.840.000	587.836.694	79,45%	152.003.306
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607.200.000	556.422.100	91,64%	50.777.900
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.500.000	79.575.700	96,46%	2.924.300
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000	36.619.700	93,90%	2.380.300
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.520.000	96,80%	480.000
c	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	14.996.000	99,97%	4.000
d	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.500.000	13.440.000	99,56%	60.000
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.105.000.000	1.090.109.828	98,65%	14.890.172
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.105.000.000	1.090.109.828	98,65%	14.890.172
a	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	20.000.000	19.805.000	99,03%	195.000

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
b	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	290.000.000	288.129.500	99,36%	1.870.500
c	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	196.500.000	193.397.130	98,42%	3.102.870
d	Pelayanan Informasi Publik	20.000.000	18.293.100	91,47%	1.706.900
e	Layanan Hubungan Media	528.500.000	521.478.850	98,67%	7.021.150
f	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	50.000.000	49.006.248	98,01%	993.752
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.755.000.000	1.704.118.315	97,10%	50.881.685
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	150.000.000	134.745.000	89,83%	15.255.000
a	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	134.745.000	89,83%	15.255.000
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.605.000.000	1.569.373.315	97,78%	35.626.685
a	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	101.450.000	91.990.000	90,68%	9.460.000
b	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	998.550.000	991.642.263	99,31%	6.907.737
c	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	410.000.000	394.710.052	96,27%	15.289.948
d	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	95.000.000	91.031.000	95,82%	3.969.000
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	56.760.000	55.457.145	97,70%	1.302.855
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	56.760.000	55.457.145	97,70%	1.302.855
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	56.760.000	55.457.145	97,70%	1.302.855
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	56.760.000	55.457.145	97,70%	1.302.855
					-

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	50.000.000	49.915.011	99,83%	84.989
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.000.000	49.915.011	99,83%	84.989
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.915.011	99,83%	84.989
a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	50.000.000	49.915.011	99,83%	84.989
	JUMLAH	8.104.763.000	7.683.814.944	94,81%	420.948.056

Berdasarkan hasil penghitungan tabel diatas, realiasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 94,81%. Dengan melihat efektivitas capaian kinerja beberapa indikator, maka pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 420.948.056,00 atau 5,19%.

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus efisiensi} &= 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya} \times 100\%}{\text{Target Biaya}} \right] \\
 &= 100\% - \left[\frac{\text{Rp } 7.683.814.944,00 \times 100\%}{\text{Rp } 8.104.763.000,00} \right] \\
 &= 100\% - 94,81\% \\
 &= 5,19\%
 \end{aligned}$$

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan dokumen yang menggambarkan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2022. Dokumen ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Disamping itu penyusunan LKjIP ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada tahun-tahun mendatang.

Hasil realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada tahun 2022 dengan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar 94,81% dengan tingkat efisiensi 5,19%. Sedangkan capaian kinerja dengan 7 (tujuh) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), 3 (tiga) indikator masuk kategori baik (85% - 100%) dan 4 (empat) indikator masuk kategori sangat baik (>100%). Hal ini merupakan sebuah capaian yang sangat baik dalam mendukung pencapaian kinerja daerah. Prestasi ini bukan merupakan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang secara mandiri, namun tentunya terdapat kontribusi seluruh perangkat daerah sebagai sebuah satu kesatuan dalam pemerintah Kabupaten Rembang.

4.2 REKOMENDASI

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain :

1. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan *e-Government* untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan *Smart City Kabupaten Rembang* ;
2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
3. Kolaborasi antar aplikasi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka perwujudan Rembang Satu Data dan Rembang *Smart City* ;
4. Perlunya operasionalisasi tim CISRT (*Computer Security Incident Response Team*) Kabupaten Rembang dan peningkatan kualitas SDM pengelola *cyber security* ;
5. Peningkatan analisis isu publik sehingga informasi dan respon Pemerintah Kabupaten Rembang lebih tepat sasaran.

Diharapkan laporan kinerja terhadap kegiatan, program, maupun kebijakan yang telah dilaksanakan ini, dapat memberikan informasi untuk menemukan strategi, mempertahankan capaian kinerja yang sudah sangat baik serta membuat inovasi dimasa yang akan datang sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip *good governance*.

Rembang, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

